

EFEKTIVITAS PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

(THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM OF FUNCTIONAL SCRIPT FOR THE POOR SOCIETY IN SUKOWONO DISTRICT JEMBER REGENCY)

Deni Candra Irawaan, Drs. Agus Suharsono, M. Si, Hermanto Rohman, S. Sos, MPA
 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: dpu@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program keaksaraan fungsional bagi masyarakat miskin yang dilakukan di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sudah efektif dan dilakukan berdasarkan pedoman atau tidak. Dilandasi oleh KepBup No.188.45/311/012/2006 bahwa pelaksanaan program harus merata, menyeluruh dan berdasarkan pada pedoman yang berlaku. Pengukuran efektivitas program dilihat dari grafik akan prestasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan yang telah dilakukan, selanjutnya dapat digunakan untuk evaluasi serta pedoman untuk program selanjutnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan teknik wawancara, dan data sekunder adalah studi kepustakaan dan dokumen umum tentang keaksaraan fungsional. Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan di Kecamatan Sukowono masih belum efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Keaksaraan Fungsional

Abstract

This study aimed to determine whether functional literacy program for the poor that was done in Sukowono district, Jember was effective already and based on the guidelines or not. Based on regency decision No.188.45/311/012/2006, the implementation of the program should be equitable, inclusive and based on the prevailing guidelines. Measurement of the program effectiveness would be seen from the chart public achievements in participating in the education program that has been done, and then it could be used for the evaluation as well as guidelines for the next program. This was descriptive study with a qualitative approach. This study used primary and secondary data. The primary data in this study was obtained by interview, and secondary data was from the literary study and public documents about the functional literacy. Based on interviews and research conducted in this study, the data indicated that the functional literacy program implemented in Sukowono district was not effective and maximum yet.

Keyword: Effectiveness, Fucional Script.

Pendahuluan

Pendidikan adalah fenomena yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan, bahwa di mana ada kehidupan manusia di sana pasti ada pendidikan. Masa depan seseorang sering disiapkan oleh yang bersangkutan melalui pendidikan sehingga menjadi penting arti pendidikan bagi keberlangsungan seseorang. Di Indonesia, pendidikan adalah sesuatu yang selama ini menjadi masalah serius. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau daerah-daerah pedalaman sering kali menganggap pendidikan adalah sesuatu yang berat dan tidak berguna bagi kehidupan mereka. Mereka beranggapan bahwa lebih baik bekerja dari pada melanjutkan pendidikan atau belajar. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang pendidikannya tidak tuntas atau putus sekolah karena berbagai alasan yang melatarbelakangnya. Hal ini dikarenakan pendidikan yang

tidak merata, sehingga pemahaman masyarakat pedalaman akan pendidikan tidaklah penting.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah pendidikan belumlah berhasil maksimal. Namun dalam hal ini pemerintah tidak hanya terpaku dalam program-program pendidikan yang bersifat formal. Karena setiap permasalahan dalam bidang pendidikan banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalkan faktor sosial, faktor budaya dan faktor ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus lebih jeli dan lebih memperhatikan segala sesuatu yang ada di kehidupan masyarakat, karena selama ini yang kita ketahui adalah pendidikan formal tidaklah lepas dari masalah biaya yang tinggi serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Itulah mengapa pemerintah tidaklah harus terpaku dalam pendidikan formal, sebab pada kenyataannya tidak semua kalangan masyarakat di Indonesia dapat menanggung biaya yang dianjurkan di dalam pendidikan formal. Akan tetapi, di

Indonesia ada beberapa macam pendidikan yang berbeda berdasarkan sistematika dan model pengajarannya yaitu pendidikan informal, formal dan non formal. Hal tersebut sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebagai berikut:

“jalur pendidikan di Indonesia ada tiga jalur yaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di dalam membangun masyarakat ketiga jalur pendidikan ini tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, namun dari masing-masing pendidikan tersebut memiliki karakteristik serta sasaran peserta yang berbeda berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang dimiliki.”

Di Kabupaten Jember, jumlah masyarakat miskin sangatlah tinggi menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, di seluruh Kabupaten Jember pada tahun 2012 sebanyak 114.767 jiwa. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Kabupaten Jember sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah masyarakat miskin yang sangat tinggi. Jumlah masyarakat Kecamatan Sukowono pada tahun 2012 dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 30.013 orang. Dengan jumlah tersebut, bahwa masyarakat Jember lebih 27% dari jumlah seluruh masyarakat Jember yang berada di bawah garis kemiskinan terdapat di Kecamatan Sukowono. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

tabel 1: Data jumlah masyarakat miskin Kecamatan Sukowono tahun 2012

No	Desa	Jumlah Masyarakat Miskin
1	Sumberwaru	2859
2	Sukorejo	2657
3	Sukosari	2771
4	Balet Baru	2309
5	Sumber Wringin	3396
6	Mojogemi	1888
7	Sukokerto	2439
8	Sukowono	4060
9	Dawuhan Mangli	1671
10	Arjasa	2013
11	Sumberdanti	1885
12	Pocangan	2.065
Jumlah		30.013

Sumber: Data BPS UPTD Kecamatan Sukowono.

Berdasarkan tabel di atas dengan tingginya angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Sukowono yang mencapai 30.013, tidak bisa dipungkiri hal tersebut berdampak negatif terhadap pendidikan. Dengan demikian,

bisa dikatakan bahwa banyak sekali masyarakat Sukowono yang taraf atau tingkat pendidikannya juga masih kurang.

Hal itu juga dapat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Sukowono tidaklah memenuhi standart yang ditentukan oleh pemerintah yaitu wajib sekolah 9 tahun, mengingat pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan sangatlah besar. Dalam menangani masalah ini pemerintah harus mampu meningkatkan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat. Salah satu program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan terhadap masyarakat miskin adalah menciptakan kegiatan pendidikan yang mudah dan fleksibel. Salah satunya adalah pendidikan non formal, dan Phillips H. Combs (dalam Joesoef 1992:50) mengungkapkan bahwa :

“pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.”

Saat ini pendidikan non formal harus lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah, karena hanya dengan jalan inilah pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada masyarakat miskin. Melihat pendidikan formal saat ini masih membutuhkan biaya yang tinggi, yang dimana masyarakat miskin tidak akan dapat menanggung biaya tersebut. Salah satu bentuk dari pendidikan non formal tersebut adalah program pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF).

Dengan tujuan utama meningkatkan maka model pendidikan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak yang berasal dari masyarakat miskin atau juga daerah terpencil. Seperti halnya di daerah Kecamatan Sukowono ini, dimana pemerintah khususnya pemerintahan Kecamatan Sukowono telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menangani masalah tingkat kualitas pendidikan yang ada di Sukowono. Namun dalam masalah ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada pada masyarakat, seperti faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor sosial yang dimana faktor sosial ini akan berpengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan dipengaruhi faktor-faktor itulah yang menyebabkan masyarakat Sukowono mengalami berpendidikan minim atau bahkan buta aksara. Berikut ini adalah data jumlah masyarakat Sukowono yang tergolong dalam masyarakat buta aksara, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2: Jumlah penduduk buta aksara di Kecamatan Sukowono tahun 2012

No	Desa	Jumlah Masyarakat Yang Mengalami Buta Aksara
1	Sumberwaru	537
2	Sukorejo	734

3	Sukosari	763
4	Balet Baru	715
5	Sumber Wringin	1273
6	Mojogemi	686
7	Sukokerto	737
8	Sukowono	1190
9	Dawuhan Mangli	458
10	Arjasa	405
11	Sumberdanti	347
12	Pocangan	543
Jumlah		8388

Sumber :UPTD Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Dengan melihat tabel di atas, bahwa jumlah masyarakat buta aksara yang berada di Kecamatan Sukowono sangatlah tinggi. Mengingat jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Sukowono juga sangat tinggi yaitu mencapai 11.828 jiwa. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dasar dari timbulnya masalah buta aksara ini dipengaruhi oleh faktor perekonomian masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah harus dapat menyadarkan masyarakat Sukowono akan pentingnya pendidikan. Karena masyarakat Sukowono cenderung mempunyai prinsip "lebih baik bekerja dari pada bersekolah".

Dengan kenyataan itu, apakah program Keaksaraan Fungsional ini akan dapat memberikan pengaruh yang efektif terhadap pendidikan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Sukowono. Bagaimana peranan serta relasi yang terjadi antara kenyataan tersebut dengan studi Ilmu Administrasi Negara. Hal itulah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini, yang berjudul **"Efektivitas Program Keaksaraan Fungsional Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember"**.

Setiap penelitian rumusan masalah selalu dibutuhkan dalam memperjelas masalah yang sedang diteliti serta dapat membantu peneliti untuk menggambarkan tentang apa yang sedang terjadi atau pokok permasalahan yang sedang diteliti dengan jelas dan tegas. Menurut Moleong (2001:65), "Fokus penelitian atau rumusan masalah pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya". Sehingga penelitian yang dilakukan akan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan nantinya akan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis.

Dengan penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan situasi sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang tinggal di Desa Sukuwono, kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember untuk mewakili atau sebagai sampel dalam masalah penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Bagaimana tingkat efektivitas program Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat miskin yang berada di Desa Sukowono?"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam mengatasi masalah kualitas pendidikan serta mendeskripsikan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Sukowono dengan adanya program Keaksaraan Fungsional ini.

Manfaat penelitian ini adalah Dengan hasil yang di dapat dari penelitian ini yang berupa data, hipotesis ataupun titik temu dari masalah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu pengaruh yang signifikan dan mampu memberikan pengembangan terhadap Ilmu Administrasi Negara khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan masalah kemiskinan pada kehidupan masyarakat. Serta dapat memberikan atau menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, sehingga peneliti dapat menerapkan segala sesuatu yang di dapat waktu perkuliahan pada permasalahan yang nyata. Misalnya seperti teori-teori administrasi ataupun konsep-konsepnya yang ada pada administras publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menekankan pada paradigma kualitatif dan tipe penelitian deskriptif yang mengukur efektivitas program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan di Kecamatan Sukowono. Teknik pengambilan data di lapangan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada penyelenggara program dan warga belajar, observasi dan berpacu pada dokumen keaksaraan fungsional. Penelitian dilaksanakan dari Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Maret 2013 di Kecamatan Sukowono. Dan data yang di peroleh berupa data sekunder dan primer, data sekunder meliputi data yang di peroleh dari dokumen-dokumen terkait keaksaraan fungsional dari lembaga terkait. Sedangkan data primer di peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Data-data inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur akan program keaksaraan fungsional yang dilakukan di Kecamatan Sukowono, sudah efektif dan berdasarkan standart yang berlaku atau tidak.

Hasil Penelitian

Di Kecamatan Sukowono ini, dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam penyelenggaraannya. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dasar dari tidak efektifnya program ini yaitu kaitannya dengan penentuan sasaran dan prosesnya. Dimana sering kali penetapan sasaran warga belajar Keaksaraan Fungsional banyak tidak memenuhi standart atau tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, begitu juga dengan proses pelaksanaan yang dilakukan. Dimana dalam proses pelaksanaan ini seharusnya benar-benar dilakukan

berdasarkan dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, sebab proses inilah yang nantinya akan dapat menunjukkan hasil atau pencapaian dari program Keaksaraan Fungsional tersebut. Dimana tingkat keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh oleh program merupakan tolak ukur efektivitas program yang dilakukan tersebut. Dimana efektivitas dari program tersebut dapat diukur atau dilihat dari apa yang diperoleh oleh masyarakat serta perubahan apa yang terjadi pada masyarakat setelah mengikuti program kegiatan Keaksaraan Fungsional ini.

Kegiatan yang tidak berdasarkan pedoman dalam menentukan sasaran misalnya seperti umur warga belajar tersebut, bukan berasal dari masyarakat miskin, dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil tidak dapat mengikuti program ini. Masalah-masalah itulah yang menurut peneliti yang tidak berdasarkan pada ketentuan atau pedoman yang berlaku. Dengan melihat kenyataan itu, Bapak Mulyono berpendapat dalam wawancara yang dilakukan pada 24 Februari 2013 bahwa:

“mengenai masalah yang bukan masyarakat miskin itu, saya pikir itu bukan salah kami. Karena kami mengikuti data masyarakat buta aksara dari BPS untuk menentukan peserta warga belajar. Sedangkan dengan masalah umur dari peserta warga belajar sendiri, mungkin dari ketidak tahuan kami akan identitas dari warga tersebut kan kebanyakan kalau orang tua itu lupa akan tanggal lahirnya. Dan kalau dari masyarakat yang berasal dari pedesaan atau terpencil itu masalahnya pada transportasi mas, karena disini masih banyak yang tidak memiliki kendaraan sendiri.”

Dengan keadaan seperti itu, seharusnya pemerintah dapat menciptakan suatu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono ini. Misalkan seperti, memberikan sarana tempat khusus di setiap desa yang ada supaya kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan merata di semua kalangan masyarakat. Dan hal itu nantinya dapat menciptakan kegiatan program yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, karena kalau bicara tentang pendidikan. Masyarakat pedesaan atau terpencil merupakan masalah yang sudah tidak baru lagi, karena masalah pendidikan masyarakat yang rendah identik dengan tempat tinggal atau kawasan masyarakat itu tinggal.

Selain itu juga, penyelenggara harus lebih memperhatikan lagi kriteria masyarakat yang bisa dijadikan warga belajar. Seperti pada segi umur, dimana yang ditentukan dalam pedoman yang ada yaitu tidaklah lebih dari 60 tahun. Namun, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Masih ada masyarakat yang tercantum sebagai peserta warga belajar yang berumur lebih dari 60 tahun. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono ini berjalan dengan tidak berpedoman pada pedoman yang ada. Dengan

kenyataan inilah pastinya akan berakibat pada efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan, misalkan seperti pada segi waktu dimana hal ini akan membuang-buang waktu karena dalam memberikan pengajaran pada seseorang yang telah berumur atau lansia itu bukanlah hal mudah. Mengingat dalam dengan keadaan usia tersebut, pastinya daya ingat dan kesehatan tubuh sangatlah lemah. Dampaknya adalah kegiatan Keaksaraan Fungsional yang dilakukan tidak akan efektif dan membutuhkan waktu yang lama.

Maka selain memperhatikan tempat pelaksanaan program dan kriteria dalam menentukan peserta belajar, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jember adalah penambahan jumlah anggota penyelenggara. Karena salah satu masalah yang ada pada penyelenggara dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini adalah jumlah tenaga yang minim.

Pembahasan

Dengan keterbatasan-keterbatasan inilah mengapa program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan di Kecamatan Sukowono tidak berjalan secara maksimal dan tidak efektif. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah untuk bisa menunjang serta memfasilitasi kegiatan yang dilakukan, supaya dalam pelaksanaan program tersebut dapat memberikan output yang maksimal.

Berikut ini adalah data tabel tentang pelaksanaan Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono yang berdimensikan pada penentuan sasaran dan proses yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari tabel berikut ini kita dapat melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berdasarkan pada ketentuan atau pedoman yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3:

Tahap	Keaksaraan Fungsional Menurut Pedoman	Pelaksanaan Di Kecamatan Sukowono	Gap	Alasan
Tahap I	Masyarakat buta aksara yang belum memiliki keterampilan dasar.	Masyarakat yang mengalami buta aksara.	Tidak Ada	Pelaksanaan kegiatan beranggotakan warga belajar yang benar-benar buta aksara.
	Umur dibawah 60 tahun.	Banyak warga didik yang lebih dari 60 tahun.	Ada	Tidak sesuaiya umur pada peserta didik.
	Pemilihan warga	Masyarakat buta aksara	Ada	Kendala transportasi

	didik yang adil dan merata.	yang berada di pedesaan tidak dapat mengikuti kegiatan. Karena terbatasnya sarana prasarana pendukung.		yang terbatas serta luasnya wilayah yang ada. Sehingga menyulitkan penyelenggara untuk menjangkau masyarakat buta aksara yang ada di pedesaan.				jumlah penyelenggara yang terbatas.
	10 warga belajar dipandu oleh 1 tutor.	30 warga belajar dipandu oleh 1 tutor	Ada	Disebabkan karena keterbatasan jumlah penyelenggara.	Para tutor yang berpendidikan, berpengalaman dan memiliki kompetensi serta kualifikasi yang cukup dalam PLS.	Berasal dari pemilihan UPTD setempat. Dan hanya berpedoman pada titel yang dimiliki tidak melihat dari sisi kualifikasinya.	Ada	Dalam melakukan proses pengajaran sering kali tidak sabar/marah yang membuat warga didik merasa tidak nyaman dan takut sehingga mengakibatkan warga didik tidak mau lagi mengikuti kegiatan.
	Penyelenggara memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan.	Semua fasilitas yang diperlukan disediakan oleh penyelenggara.	Tidak Ada	Semua sarana prasarana kegiatan disediakan oleh penyelenggara.	Para penyelenggara dan tutor memiliki kedisiplinan yang tinggi.	Dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan wawancara sering kali penyelenggara datang terlambat.	Ada	Berkurangnya waktu kegiatan belajar mengajar dan mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal..
	Penyelenggara memberikan pengajaran yang dapat mengembangkan kemampuan secara fungsional sesuai dengan kebutuhan.	Kegiatan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat Sukowono dalam bidang dasar CALISTUNG.	Tidak Ada	Kegiatan dilakukan dengan tujuan mengembangkan kemampuan warga sekitar, yaitu kemampuan CALISTUNG.	Pelaksanaan belajar mengajar mengikuti kurikulum yang berlaku.	Pelaksanaan berobjekkan pada proses mendengarkan, menulis, membaca, berhitung dan berkomunikasi.	Tidak ada	Proses belajar mengajar telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Tahap II	Waktu pelaksanaan kegiatan 6 bulan untuk Keaksaraan Dasar dan 6 bulan Keaksaraan lanjutan.	Waktu pelaksanaan hanya 6 bulan sekali dan semua kegiatan (dasar / lanjutan) disamakan.	Ada	Kurang efisiennya pelaksanaan Keaksaraan yang dilaksanakan karena Keaksaraan dasar dan lanjutan dilaksanakan secara bersamaan. Mengingat	Prestasi peserta didik terakui dengan adanya STSB (surat tanda selesai belajar).	Dalam kelulusan warga belajar penyelenggara hanya berdasarkan pada data dari para tutor. Tanpa adanya pengakuan yang jelas.	Ada	Akibat yang timbul adalah warga didik menganggap kegiatan yang berlangsung tidak penting / meremehkan. Bahkan dapat terjadi

				masyarakat yang telah lulus terdata kembali dalam peserta belajar, sehingga mengakibatkan jumlah garapan buta aksara yang tidak selesai-selesai.		terhadap peningkatan dan pengembangan warga didik terpantau jelas.	warga belajar.		mendatangi ya serta mengajak berkomunikasi dan melihat peningkatan apa yang terjadi pada warga belajar.
	Rutinitas warga belajar dalam mengikuti kegiatan.	Berdasarkan wawancara dengan warga belajar sering tidak mengikuti kegiatan dikarenakan kesibukan dari warga belajar.	Ada	Proses kegiatan berlangsung dengan tidak maksimal.		Setiap warga belajar yang telah lulus program Keaksaraan akan diberikan STSB (surat tanda selsai belajar)	STSB di berikan oleh peynelengga ra setelah warga belajar telah dianggap lulus atau tuntas belajar keaksaraan.	Tidak Ada	Sebagai tanda bukti bagi warga belajar bahwa dirinya telah lulus dalam kegiatan Keaksaraan. Dan hal ini juga untuk menghinari adanya penggandaan warga belajar untuk program kegiatan Keaksaraan yang selanjutnya.
	Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan dengan kondisi baik.	Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti tempat pelaksanaan .	Ada	Pelaksanaan yang kurang maksimal karena dilaksanakan secara berpindah-pindah dan tidak menjangkau masyarakat yang ada di pedesaan.					
	Kegiatan bersifat fleksibel, luwes dan mudah.	Kegiatan yang memudahkan warga belajar, dimana penyelenggara melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.	Tidak ada	Kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan waktu dan tempat yang dapat disanggupi oleh warga belajar.					
Tahap III	Evaluasi dan monitoring	Pemantauan dilakukan dengan cara mendatangi	Tidak ada	Penyelenggara memantau warga belajar dengan					

Sumber: Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data diataslah mengapa program Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono tidak berjalan dengan efektif. masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan atau pedoman yang berlaku dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Dapat kita lihat di tabel diatas, pada objek sasaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan atau pedoman yang ada. Seperti halnya usia warga belajar, peserta warga didik yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh para penyelenggara belumlah maksimal. Dimana mereka (penyelenggara) dalam melaksanakan program tidak berdasarkan pada pedoman atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dengan begitu, pemerintah Jember diharapkan untuk lebih meningkatkan dukungan dan perhatiannya terhadap program ini supaya penyelenggara dapat melaksanakan program dengan fasilitas dan sarana prasaran yang memadai. Dan nantinya diharapkan terciptanya kegiatan pendidikan yang efektif terhadap masyarakat, dan juga diharapkan adanya peningkatan pada masyarakat dalam segi pendidikan yang nantinya dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat yang ada. Dengan harapan-

harapan itulah yang mendasari atau merupakan maksud dan tujuan dari adanya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional ini dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa, untuk keefektifan program Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini tidak berjalan secara efektif. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terdapat beberapa kegiatan yang tidak berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku. Terutama pelaksanaan program di bidang Tahap I dan Tahap II, yang dalam kegiatannya bidang penetapan sasaran dan proses pelaksanaan program. Dimana dalam bidang ini merupakan kelemahan yang sangat mencolok dari ketidak efektifan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Sukowono, terutama bagi lembaga yang terkait yaitu UPTD Kecamatan Sukowono agar lebih optimal dalam melaksanakan program kegiatan Keaksaraan Fungsional ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih sasaran sebagai peserta warga belajar program Keaksaraan Fungsional supaya pemilihannya tepat sasaran dan berdasarkan kriteria ketentuan yang ada.
2. Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar para tutor harus bisa lebih meningkatkan kedisiplinannya.
3. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat agar masyarakat setempat lebih antusias terhadap pelaksanaan program-program pendidikan yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta Ridho-Nya, skripsi dengan judul: **"Efektivitas Program Keaksaraan Fungsional Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember"**, ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dapat guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pendidikan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

2. Bapak Dr.Sasongko,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos,MAP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Selfi Budi Helpiastuti S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan konsultasi pada waktu perkuliahan.
7. BapakDrs. Boedijono, M.Si dan Drs. Supranoto, M.Si selaku penguji yang telah meluluskan peneliti serta membantu skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik dan benar.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas bimbingannya selama penulis menempuh perkuliahan.

Daftar Pustaka

- Abidin zainal, Said.2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy.1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Faisal, Sanapiah.1981. *Pendidikan Luar Sekolah Dalam Sistem Pendidikan Dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Dan Pengembang SDM*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Steers, Richard M. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Singarimbun, Masri.1989.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia.
- Miles, Matthew B dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : (UI) Universitas Indonesia.
- Dunn, William.1999. *Pengantar analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1994. *Penelitian Terapan*.Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.